

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Untuk Mengualifikasi Pelaku Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika” yang bertujuan menganalisa tolak ukur Polisi untuk mengambil tindakan Diskresinya serta Diskresi Polisi dalam menangani pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana Narkotika. Untuk menjawab rumusan masalah, dalam penulisan skripsi ini dibantu dengan menggunakan metode penelitian hukum dibantu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Tindak pidana Narkotika ialah salah satu dari tindak pidana yang tidak pernah surut eksistensinya di negara Indonesia karena dampak negatif yang disebabkan begitu besar dan membahayakan. Sebagai aparat penegak hukum, Polisi tentu turut andil dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam melakukan penegakan hukum, Polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang berupa Diskresi. Diskresi yang diterapkan oleh Polisi dalam menangani tindak pidana Narkotika ialah Diskresi dalam mengualifikasi pelaku tindak pidana Narkotika sebagai pelaku kejahatan terorganisasi. Pengualifikasian pelaku sebagai pelaku kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Polisi didasarkan atas tolak ukur yang terdiri atas konsep-konsep substansi peraturan perundang-undangan dan teori mendukung yang berasal dari doktrin. Polisi dengan kewenangannya, melaksanakan teknik penyidikan sebagai sarana untuk menangani pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika. Selain itu, jaksa selaku penyidik dan penuntut umum juga turut andil dalam menuntut pelaku kejahatan terorganisasi dengan pemberatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Peran dari kedua aparat penegak hukum tersebut sangatlah penting untuk memberantas pelaku kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana Narkotika.

Kata Kunci: Diskresi, Kejahatan Terorganisasi, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

The thesis with its title “Discretion in Investigation for Qualifying Organized Crime Actors on Illicit Drug Traffic” is purposed to analyze the benchmarks for the Police in taking discretion alongside handling the organized crime actors of illegal drug trafficking. On the behalf of answering the problem solving, this thesis is aided by using legal research method that assisted with a legislative approach, conceptual approach, and case study approach. Illegal drug trafficking is one of the criminal offense which its existence will never be ceased in Indonesia, this however due to its negative impacts. As the law enforcer, the Police is obligated to contribute during the efforts of the eradication of narcotic activity. During the enforcement of the law, the police agency has been given its authority by the law in the form of discretion. The form of discretion that applied by the police agency is the discretion in term of determining or qualifying the perpetrator of the illegal drug trafficking as an organized crime actors. Qualifying the perpetrator as organized crime actors that carried out by the Police is based on benchmarks that consist of substantive concepts, rule of law, and bolstering theories. The Police, with their authority, carrying out investigative techniques as a means to deal with organized crime actors of illicit drug trafficking. The benchmarks are also useful to be used as a guide for the police in the exercise of their discretion. In addition, lawyers as investigators and judges also engage in the protection of organized freedom, as provided for in The law number 35 years 2009 on Narcotic. The role of law enforcers in this approach also requires special assistance in the eradication of organized crime actors on illegal drug trafficking problems.

Keywords : *Discretion, Illegal Drug Trafficking, Organized Crime.*